

Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit Tahun 2014-2018

BARITO GRINCA PAHALA SILALAH¹, SATRIA TRI NANDA², FAIZAH KAMILAH³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : satriatrinanda@unilak.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to find out and analyze the efficiency and effectiveness of the performance of the Riau Provincial Government when viewed from financial ratios which include the Decentralization Ratio, Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Harmony Ratio, knowing and analyzing performance The Riau Provincial Government when viewed from the ability of human resources owned and viewed from the management of natural resources owned. The population in this study were all employees of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Riau Province as many as 112 people. The sample in this study were employees BPKA Riau Province who works in the field of preparing the Budget and Financial Statements as many as 15 people. Data analysis used quantitative descriptive method. The results of the study stated that the performance of the Riau Province government seen from the Ratio of Degrees of Fiscal Decentralization or Regional Fiscal Autonomy (DDF) during 2014-2018 was categorized as good, the average percentage was close to 50%. The Regional Financial Independence Ratio (RKKD) is in the high category. The PAD Effectiveness Ratio is categorized as poor because it has not yet reached 100%. The Financial Efficiency Ratio is in the poor category. because the average efficiency ratio is more than 100%. Operational Expenditure Harmony Ratio in the balanced category. The Capital Expenditure Harmony Ratio is categorized as unbalanced. The ability of human resources in the Riau Provincial Government in good condition can be seen from the average score of 3.44 which is categorized as good. The management of natural resources by the Riau Provincial Government has been running well, it can be seen from the average score of 4.04 which is categorized as good.

Keywords: *Performance, Value for Money Audit, Riau*

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif serta menjalankan disiplin anggaran bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Melalui penerapan *good corporate governance*, maka dapat mewujudkan kinerja instansi pemerintah yang lebih baik (Nasrun, 2018:20). Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan membandingkan antara rencana kerja dan realisasinya. Selain itu dapat juga digunakan untuk mengukur peningkatan

kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan (Halim, 2011: 150).

Value for money merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. *Value for money* menurut Mardiasmo (2011: 4) adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang

mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah serta kurangnya usaha dan

kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada kemudian inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari penerimaan PAD Provinsi Riau berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau Tahun 2013-2018

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase Perkembangan (%)
2013	2.481.635.421.737,46	2.725.623.913.109,06	109,83
2014	2.946.911.680.239,00	3.245.087.745.089,53	110,12
2015	3,407,516,235,044,97	3,476,960,097,649.19	102,04
2016	3,496,148,893,131.13	3,110,656,139,756.52	88,97
2017	3.859.298.000.000,00	3,360,008,975,199.29	86,07
2018	3,963,964,459,139.25	3,638,995,740,121.15	91,80

Sumber : BPPKAD Provinsi Riau, 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi PAD Provinsi Riau pada tahun 2013-2015 dapat melampaui target PAD yang ditetapkan, namun pada tahun 2016-2018 realisasi PAD mengalami peningkatan namun tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan turunnya kinerja anggaran pemerintah provinsi Riau.

Penelitian ini melakukan analisa kualitas kinerja keuangan dengan menggunakan tolok ukur sebagai berikut : menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, melihat kinerja keuangan jika dilihat dari : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Pajak Daerah terhadap PAD.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Provinsi Riau terutama pada tahun 2016-2019 antara lain: 1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, 2) APBD Riau 2019 porsinya banyak

digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), yakni Rp5,07 triliun dari total APBD Rp9,179 triliun. Sedangkan Belanja Langsung (BL) hanya sebesar Rp4,102 triliun. belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp2,415 triliun atau 48% dari BTL, kemudian untuk Belanja langsung terbesar digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp2,438 triliun atau 59 persen dari total Belanja Langsung, Belanja Langsung sebesar Rp401 miliar atau 10% digunakan untuk perjalanan dinas. Artinya anggaran untuk kesejahteraan masyarakat sangat kecil karena belanja langsung banyak digunakan untuk belanja tidak prioritas seperti perjalanan dinas (www.gatra.com). Jika dikaitkan dengan value of monye maka ini berarti penggunaan APBD Provinsi Riau di tahun 2019 masih belum efektif dan efisien.

Penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya adalah :

Villanova (2015) hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2009-2012 masih sangat kurang, kinerja pemerintah didalam

memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) sudah efisien, rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil. Penelitian Suwendra, Saputra dan Yudiantmaja (2016), hasil penelitian mengatakan bahwa varian pendapatan yang terjadi di Kabupaten Jembrana pada tahun 2010-2014 dikatakan baik. Namun pada rasio derajat desentralisasi masuk kategori sangatkurang, bahkan pada rasio kemandirian sangat rendah. Namun rasio pertumbuhan, varian belanja, dan rasio efisiensi masuk kategori baik.

Penelitian Adhiantoko (2013) menyatakan kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blera jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blera jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blera jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD Kabupaten Blera tidak efektif.

Adanya permasalahan pada APBD Provinsi Riau pada tahun 2019 yang dirasakan kurang efisien dan efektif, membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali tentang kualitas kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang sama dengan penelitian terdahulu. Namun perbedaan dengan penelitian Arief, dkk (2017) adalah pada periode penelitian, selain itu penelitian ini menambahkan analisa berdasarkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Provinsi Riau.

Teori Stakeholder

Azheri (2012: 112) mengemukakan bahwa stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan

akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya.

Menurut Azheri (2012: 114) teori stakeholder mengatakan bahwa instansi/perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu instansi/perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup instansi/perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas instansi/perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilaidengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Menurut Mamesah dalam Halim dan Kusufi (2012:25) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilaidengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku

Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2011: 121) kualitas kinerja keuangan merupakan gambaran atau kondisi kinerja sektor publik berdasarkan perhitungan rasio yang dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (a) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (b) untuk pengalokasian sumber ddaya dan pembuatan keputusan dan (c) untuk

mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sementara itu Liando, Saerang dan Elim (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2011;32) :

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD_t = Total Pendapatan Daerah tahun t

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajakdan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumberlain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2011 : 262). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah (Widodo, 2011:262):

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumusnya adalah (Halim, 2011;170)

$$Rasio Efektivitas PAD = \frac{Realisasi PAD}{Anggaran} \times 100$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2013), adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah (Halim, 2011:234):

$$EKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kecerassian

Rasio Kecerassian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Kecerassian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2011:236):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kualitas Sumber Daya Manusia

Widodo (2011:87) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya (Boulter, Dalziel dan Hill, 2011:53). Adapun yang menjadi indikator kompetensi sumber daya manusia

menurut (Hutapea dan Nurianna, 2011: 28) yaitu:

1. Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang meliputi:
 - a. Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja
 - b. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam perusahaan
 - c. Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan, dan taknik yang tepat dan benar.
2. Keterampilan individu meliputi:
 - a. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan
 - b. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan jelas secara lisan.
3. Sikap kerja
 - a. Memiliki kemampuan dalam berkeaktivitas dalam bekerja
 - b. Adanya semangat kerja yang tinggi
 - c. Memiliki kemampuan dalam perencanaan/ pengorganisasian.

Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menurut Boediono (2011) bahwa potensi penerimaan daerah terdiri atas variabel-variabel sebagai berikut : 1) PDRB sektor sumber daya alam (primer), 2) PDRB sektor indstutri dan jasa lainnya (non primer), 3) Besarnya angkatan kerja.

Menurut Halim (2011:175) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah 1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin,

oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan objek penelitian rasio kinerja keuangan daerah dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian, kompetensi SDM dan pengelolaan sumber daya alam

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif yaitu data berupa hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengenai kinerja keuangan daerah, kompetensi SDM dan pengelolaan sumber daya alam.
2. Data Kuantitatif yaitu data berupa rasio-rasio keuangan dan angka PAD, pengeluaran pemerintah dan lain sebagainya yang terdapat dalam Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Riau.

Adapun sumber data terdiri dari :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengenai kinerja keuangan daerah, kompetensi SDM dan pengelolaan sumber daya alam.
2. Data Sekunder adalah data dalam bentuk jadi yang diperoleh dari instansi tempat penelitian berlangsung berupa Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Riau Tahun 2014-2018.

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber yang telah ditunjuk untuk mengetahui tentang kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data dari Pemerintah Provinsi Riau berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa :Gambaran umum Provinsi Riau dan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2014-2018.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel operasionalisasi variabel berikut ini :

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Alat Ukur	Kriteria
Rasio Keuangan Daerah	adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang	a.Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rumus sebagai berikut (Halim, 2011;32) : $DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$	Sangat Kurang Kurang Cukup Sedang Baik Sangat baik
		b. Rasio Kemandirian dengan rumus sebagai berikut (Widodo, 2011;262): $RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$	Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi

	diberikan kepada masyarakat.	<p>c. Rasio Efektivitas PAD dengan rumus (Halim, 2011:170). $RPAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran}} \times 100$</p> <p>d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah</p> <p>Rumus (Halim, 2011:234) $REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$</p> <p>e. Rasio Keserasian dengan rumus (Halim 2011:236): $RBO = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ $RBM = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$</p>	<p>Tidak Efisien Kurang Efisien Cukup Efisien Efisien Sangat Efisien</p> <p>Seimbang Tidak Seimbang</p>
Kemampuan Sumber Daya Manusia	Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.	<p>1. Pengetahuan</p> <p>a. Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja</p> <p>b. Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam perusahaan</p> <p>c. Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan, dan teknik yang tepat dan benar.</p> <p>2. Keterampilan</p> <p>a. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan</p> <p>b. Kemampuan dalam berkomunikasi dengan jelas secara lisan.</p> <p>3. Sikap</p> <p>a. Memiliki kemampuan dalam berkeaktifan dalam bekerja</p> <p>b. Adanya semangat kerja yang tinggi</p> <p>c. Memiliki kemampuan dalam perencanaan/ pengorganisasian</p> <p>Sumber: Hutapea dan Nurianna, 2011 : 28)</p>	Interval (Likert)
Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Adalah kemampuan dalam mengelola seluruh sumber daya alam yang ada untuk kepentingan masyarakat	<p>PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)</p> <p>a. Pendapatan daerah dari berbagai sektor primer khususnya dari hasil pengelolaan sumber daya alam</p> <p>Sumber: Budiono (2011)</p>	Interval (Likert)

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Selanjutnya dengan menggunakan keenam rasio keuangan daerah maka dilakukan analisis data secara deskriptif kuantitatif mengenai kinerja keuangan daerah dan terakhir dari hasil analisis data dapat ditarik beberapa kesimpulan.

HASIL

Kinerja Keuangan Provinsi Riau

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk mengetahui tentang Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Provinsi Riau, dapat dilihat bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 rata-rata sebesar 43,23% dimana nilai Total PAD rata-rata sebesar Rp. 3.259.555.435.154,12 sedangkan Total Pendapatan Daerah rata-rata sebesar Rp. 7.560.748.715.444,29. Rasio DDF Provinsi Riau yang terendah adalah 38,96% yaitu pada tahun 2013 dan tertinggi sebesar 50,31% pada tahun 2015. Jika dilihat dari data pada tabel 5.1. maka rasio DDF setiap tahun mengalami fluktuasi dimana penurunan drastis hingga 10,95% terjadi pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada PAD, sementara pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 26,08%, yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada total PAD. Tabel 5.1. menunjukkan bahwa nilai Total PAD Provinsi Riau cukup baik jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam menggali sumber-sumber PAD sudah dilaksanakan secara optimal terbukti selama 7 tahun terakhir ini rata-rata rasio DDF Provinsi Riau sudah mencapai 43,23%.

2. Rasio Kemandirian

Untuk mengetahui tentang Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Riau, bahwa Rasio Kemandirian Provinsi Riau

selama Tahun 2013-2018 rata-rata sebesar 77,07% dimana nilai Total PAD rata-rata sebesar Rp. 3.259.555.435.154,12 sedangkan Total Pendapatan Transfer rata-rata sebesar Rp. 4.249.844.465.623,50. Rasio Kemandirian Provinsi Riau yang terendah adalah 64,19% yaitu pada tahun 2013 dan tertinggi sebesar 101,38% pada tahun 2015. Pada tabel 5.2. juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 rasio Kemandirian mengalami penurunan sebesar 19,88% dan meningkat di tahun 2015 sebesar 52,69%, lalu kembali menurun di tahun 2016 sebesar 19,88%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pada PAD, sementara pada tahun 2015 mengalami peningkatan tertinggi sebesar 52,69%, yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada total PAD.

Total PAD Provinsi Riau cukup tinggi jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Transfer. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam menggali sumber-sumber PAD telah dilaksanakan secara optimal terbukti selama 7 tahun terakhir ini rasio Kemandirian Rata-rata Provinsi Riau sudah mencapai 77,07%. Sementara semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

3. Rasio Efektivitas PAD

Untuk mengetahui tentang Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi Riau, dapat dilihat bahwa Rasio Efektivitas PAD Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018

rata-rata sebesar 98,30% dimana nilai Realisasi PAD rata-rata sebesar Rp. 3.529.555.435.154,12 sedangkan Anggaran PAD rata-rata sebesar Rp. 3.359.245.781.548,63. Rasio Efektivitas PAD Provinsi Riau yang terendah adalah 87,06% yaitu pada tahun 2017 dan tertinggi sebesar 110,12% pada tahun 2014. Pada tabel 5.3. juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2015-2017 rasio Efektivitas PAD mengalami penurunan sebesar 7,34% kemudian menurun 12,80% dan penurunan terjadi lagi di tahun 2017 sebesar 2,15% kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 5,44%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan realisasi PAD, sementara pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,44%, yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada total PAD. Tabel 4. menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 nilai Realisasi PAD Provinsi Riau masih rendah jika dibandingkan dengan Anggaran PAD. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai target PAD belum efektif. Menurut Halim (2011;170) rasio Efektivitas PAD dikatakan tidak efektif jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$).

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Untuk mengetahui tentang Rasio Efisiensi PAD Pemerintah Provinsi Riau, dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 rata-rata sebesar 81,67% dimana nilai Realisasi Belanja Daerah rata-rata sebesar Rp. 6.128.253.456.349,66 sedangkan Realisasi Pendapatan Daerah rata-rata sebesar Rp. 7.560.748.715.444,29. Rasio Efisiensi Keuangan Provinsi Riau yang terendah adalah 49,83% yaitu pada tahun 2014 dan tertinggi sebesar 94,98% pada tahun 2016. Pada tabel 5. juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 rasio Efisiensi Keuangan mengalami penurunan sebesar 45,41% dan penurunan tertinggi di tahun 2014 tersebut. Peningkatan rasio terjadi di tahun 2015 sebesar 60,99%,. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada realisasi PAD, sementara pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 18,38%, yang

disebabkan oleh adanya peningkatan pada realisasi belanja daerah, sementara pendapatan daerah mengalami penurunan. Tabel 5.4. menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau belum mengelola pendapatan daerah mereka secara efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam menggunakan pendapatan daerah belum efisien. Menurut Halim (2011;170) rasio efisiensi keuangan dikatakan efisien jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$).

5. Rasio Keserasian

Untuk mengetahui tentang Rasio Keserasian Berdasarkan Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Riau, dapat dilihat bahwa Rasio Keserasian Belanja Operasi Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 rata-rata sebesar 73,43% dimana nilai Realisasi Belanja Daerah rata-rata sebesar Rp. 6.128.253.456.349,66 sedangkan Realisasi Belanja Operasi rata-rata sebesar Rp. 4.476.777.696.310,30. Rasio Keserasian Belanja Operasi Provinsi Riau yang terendah adalah 63,67% yaitu pada tahun 2015 dan tertinggi sebesar 84,63% pada tahun 2018. Pada tabel 5.5. juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 Rasio Keserasian Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar 24,75%. Peningkatan tertinggi rasio ini terjadi di tahun 2014 sebesar 30,48%,. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada realisasi belanja operasi, sementara pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 14,82%, yang juga disebabkan oleh adanya peningkatan pada realisasi belanja operasi. Keserasian belanja modal Pemerintah Provinsi Riau sudah seimbang. Artinya sebagian besar pendapatan daerah Provinsi Riau digunakan untuk belanja operasi yaitu untuk membayar gaji pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan partai politik dan sudah sesuai dengan proporsi yaitu antara 60-90%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam menggunakan pendapatan daerah

sudah tepat karena sebagian besar pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja operasional.

Untuk mengetahui tentang Rasio Keserasian Berdasarkan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Riau, dapat dilihat bahwa Rasio Keserasian Belanja Modal Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 rata-rata sebesar 26,57% dimana nilai Realisasi Belanja Daerah rata-rata sebesar Rp. 6.128.253.456.349,66 sedangkan Realisasi Belanja Modal rata-rata sebesar Rp. 1.651.190.458.658,02. Rasio Keserasian Belanja Modal Provinsi Riau yang terendah adalah 15,37% yaitu pada tahun 2018 dan tertinggi sebesar 35,15% pada tahun 2013. Pada tabel 5.6. juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 Rasio Keserasian Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 56,22%, 15,03%, 14,81% dan 41,54% yang merupakan penurunan tertinggi adalah pada tahun 2014 yaitu mengalami penurunan sebesar 56,22%. Peningkatan rasio ini terjadi di tahun 2015 sebesar 136,10%,. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada realisasi belanja

modal.

Keserasian belanja modal Pemerintah Provinsi Riau tidak seimbang. Artinya jumlah pendapatan daerah Provinsi Riau yang digunakan untuk belanja modal yaitu untuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya tidak proporsional karena lebih dari proporsi yang ditetapkan yaitu 5%-20%, terutama pada tahun 2013, 2015, 2016, 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam menggunakan pendapatan daerah belum tepat karena proporsi pendapatan daerah yang dialokasikan untuk belanja modal melebihi persentase yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2018 nilai belanja modal sudah sesuai dengan proporsi yang ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya rasio keuangan daerah Provinsi Riau Tahun 2013-2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Rasio Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Riau Tahun 2013-2018

Rasio	Tahun						Rata-rata	Keterangan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Derajat Desentralisasi Fiskal	38,96	39,9	50,31	44,8	42,52	42,92	43,24	Cukup Baik
Rasio Kemandirian	64,19	66,4	101,38	81,23	74,02	75,23	77,08	Tinggi
Rasio Efektivitas	109,83	110,12	102,04	88,97	87,06	91,8	98,30	Tidak Efektif
Rasio Efisiensi	91,29	49,83	80,23	94,98	93,4	80,31	81,67	Tidak Efisien
Rasio Keserasian-Biaya Operasi	64,85	84,61	63,67	69,1	73,7	84,63	73,43	Sudah Seimbang
Rasio Keserasian-Biaya Modal	35,15	15,39	36,33	30,87	26,3	15,37	26,57	Belum Seimbang

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa rasio Derajat Desentralisasi Fiskal rata-rata sebesar 43,24% berdasarkan kategorinya maka rasio kemandirian ini berkategori cukup baik. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan kontribusi yang layak terhadap Total Pendapatan Daerah. Rasio kemandirian rata-rata sebesar 77,08% berdasarkan kategorinya maka rasio kemandirian ini berkategori tinggi. Artinya kemampuan Pemprov Riau dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sudah

tergolong tinggi. Pemprov Riau tidak terlalu tergantung pada Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dari Dana Darurat dan Pinjaman.

Rasio efektivitas rata-rata sebesar 98,30% atau berkategori tidak efektif, hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau belum efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkannya dalam bentuk penggunaan anggaran untuk pembangunan. Rasio efisiensi rata-rata sebesar 81,67% yang berkategori tidak efisien, hal ini karena

belanja daerah lebih besar nilainya dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah. Artinya Pemerintah Provinsi Riau belum efisien dalam mengelola pendapatan yang diterima dan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya rasio keserasian biaya operasi rata-rata sebesar 73,43% yang berkategori sudah seimbang, artinya belanja operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 73,43% dari total belanja daerah yang telah dianggarkan sudah seimbang yaitu sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan yaitu antara 60%-90%. Rasio keserasian biaya modal rata-rata sebesar 26,57%, yang berkategori tidak seimbang, artinya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 26,57% dari total belanja daerah tidak sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan yaitu antara 5%-20%.

2) Kemampuan Sumber Daya Manusia

Tanggapan responden yang sebagian besar menyatakan setuju yaitu 6 orang atau 40% dan hanya 1 orang atau 6,67% yang menyatakan tidak setuju. Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan sumber daya manusia di Pemerintahan Provinsi Riau dalam kondisi yang baik dapat dilihat dari nilai skor rata-rata sebesar 3,44 yang berkategori baik. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang baik terutama dari aspek kemampuan berkomunikasi baik tulisan maupun komunikasi lisan yang mendapat skor tertinggi, sedangkan aspek dengan skor terendah adalah kreativitas dalam bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa agar kemampuan sumber daya manusia menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang maka Pemprov Riau perlu meningkatkan kembali kreativitas pegawai dalam bekerja.

3) Pengelolaan Sumber Daya Alam

Tanggapan responden yang sebagian besar menyatakan sangat setuju yaitu 6 orang atau 40% dan hanya 1 orang atau 6,67% yang

menyatakan tidak setuju. Berdasarkan tanggapan responden tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintahan Provinsi Riau sudah berjalan baik dapat dilihat dari nilai skor rata-rata sebesar 4,04 yang berkategori baik. Dengan demikian kinerja pemerintah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik karena didukung oleh pengelolaan sumber daya alam juga telah berjalan dengan baik terutama dari aspek Pemprov Riau mengetahui sumberdaya alam yang dimilikinya, sumber daya alam tersebut dapat dijadikan sebagai PAD dan masing-masing sektor sumber daya alam tersebut telah dikelola dengan baik yang mendapat skor tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa agar pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang maka Pemprov Riau perlu meningkatkan kembali kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

PEMBAHASAN

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 rata-rata sebesar 43,23%. Rasio DDF Provinsi Riau yang terendah adalah 38,96% yaitu pada tahun 2013 dan tertinggi sebesar 50,31% pada tahun 2015. Rasio DDF setiap tahun mengalami fluktuasi dimana penurunan drastis hingga 10,95% terjadi pada tahun 2016. Nilai Total PAD Provinsi Riau sudah cukup baik jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam menggali sumber-sumber PAD sudah dilaksanakan secara optimal terbukti selama 7 tahun terakhir ini rata-rata rasio DDF Provinsi Riau sudah mencapai 43,23%.

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Rata-rata Provinsi Riau sudah mencapai 77,07%, Nilai Total PAD Provinsi Riau cukup besar nilainya jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi

Riau dalam menggali sumber-sumber PAD sudah dilaksanakan secara optimal terbukti selama 7 tahun terakhir ini rata-rata rasio DDF Provinsi Riau sudah mencapai 77,07%. Kemampuan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan sudah baik, namun demikian kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan Daerah masih perlu ditingkatkan. Tingkat kemandirian keuangan Provinsi Riau selama tiga tahun terakhir menunjukkan semakin membaik karena berada di atas nilai 70%, yang artinya tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Persentase kemandirian mencapai 77,07%, untuk dinyatakan tingkat kemandirian tersebut sedang atau cukup mandiri persentasenya adalah 50% -75%, Dengan demikian nilai rata-rata 77,07% menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 rata-rata sebesar 98,30% dimana nilai Realisasi PAD rata-rata sebesar Rp. 3.529.555.435.154,12 sedangkan Anggaran PAD rata-rata sebesar Rp. 3.359.245.781.548,63. Rasio Efektivitas PAD Provinsi Riau yang terendah adalah 87,06% yaitu pada tahun 2017 dan tertinggi sebesar 110,12% pada tahun 2014. Pada tahun 2015-2017 rasio Efektivitas PAD mengalami penurunan sebesar 7,34% kemudian menurun 12,80% dan penurunan terjadi lagi di tahun 2017 sebesar 2,15% kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 5,44%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan realisasi PAD, sementara pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,44%, yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada total PAD.

Kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai target PAD belum efektif. Pemerintah Provinsi Riau belum mengelola pendapatan daerah mereka secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai target pendapatan daerah belum efektif. Semakin kecil persentase rasio maka

semakin kurang baik tingkat efektivitasnya dan sebaliknya, maka pada tahun 2013-2018 tersebut dinyatakan tidak efektif karena realisasi PAD masih di bawah nilai target PAD. Fenomena pada tahun 2013-2018 tersebut bisa saja terjadi karena pencapaian PAD belum optimal, pemerintah Provinsi Riau belum mampu meningkatkan dan mengoptimalkan PAD.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 rata-rata sebesar 81,67%. Rasio Efisiensi Keuangan Provinsi Riau yang terendah adalah 49,83% yaitu pada tahun 2014 dan tertinggi sebesar 94,98% pada tahun 2016. Pada tahun 2014 rasio Efisiensi Keuangan mengalami penurunan sebesar 45,41%. Peningkatan rasio terjadi di tahun 2015 sebesar 60,99%,. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada realisasi PAD, sementara pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 18,38%, yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada realisasi belanja daerah, sementara pendapatan daerah mengalami penurunan. Artinya Pemerintah Provinsi Riau belum mengelola pendapatan daerah mereka secara efisien, kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam menggunakan pendapatan daerah belum efisien.

Rasio Kecerahan Belanja Operasi

Rasio Kecerahan Belanja Modal Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 rata-rata sebesar 26,57%. Rasio Kecerahan Belanja Modal Provinsi Riau yang terendah adalah 15,37% yaitu pada tahun 2018 dan tertinggi sebesar 35,15% pada tahun 2013. Pada tahun 2014, 2016, 2017 dan 2018 Rasio Kecerahan Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 56,22%, 15,03%, 14,81% dan 41,54% yang merupakan penurunan tertinggi adalah pada tahun 2014 yaitu mengalami penurunan sebesar 56,22%. Peningkatan rasio ini terjadi di tahun 2015 sebesar 136,10%.

Rasio kecerahan biaya operasi rata-rata sebesar 73,43% yang berkategori sudah seimbang, artinya belanja operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar

73,43% dari total belanja daerah yang telah dianggarkan sudah seimbang yaitu sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan yaitu antara 60%-90%. Rasio keserasian biaya modal rata-rata sebesar 26,57%, yang berkategori tidak seimbang, artinya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar 26,57% dari total belanja daerah tidak sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan yaitu antara 5%-20%.

Kemampuan sumber daya manusia di Pemerintahan Provinsi Riau dalam kondisi yang baik dapat dilihat dari nilai skor rata-rata sebesar 3,44 yang berkategori baik. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang baik terutama dari aspek kemampuan berkomunikasi baik tulisan maupun komunikasi lisan.

Pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintahan Provinsi Riau sudah berjalan baik dapat dilihat dari nilai skor rata-rata sebesar 4,04 yang berkategori baik. Dengan demikian kinerja pemerintah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik karena didukung oleh pengelolaan sumber daya alam juga telah berjalan dengan baik terutama dari aspek Pemprov Riau mengetahui sumberdaya alam yang dimilikinya, sumber daya alam tersebut dapat dijadikan sebagai PAD dan masing-masing sektor sumber daya alam tersebut telah dikelola dengan baik yang mendapat skor tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa agar pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang maka Pemprov Riau perlu meningkatkan kembali kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintah Provinsi Riau dilihat dari aspek keuangan yaitu :
 - a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal Daerah (DDF) Provinsi Riau selama Tahun 2013-

2018berkategori baik karena meskipun nilai Total PAD Provinsi Riau lebih rendah jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah namun persentase rata-ratanya mendekati 50%.

- b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018berkategori tinggi. Total PAD Provinsi Riaucukup tinggi jika dibandingkan dengan Total Pendapatan Transfer.
 - c. Rasio Efektivitas PAD Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018berkategori kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai target PAD belum efektif karena belum mencapai 100%.
 - d. Rasio Efisiensi Keuangan Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018yang berkategori kurang baik.
 - e. Rasio Keserasian Belanja Operasi Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 berkategori seimbang. Artinya sebagian besar pendapatan daerah Provinsi Riau digunakan untuk belanja operasi.
 - f. Rasio Keserasian Belanja Modal Provinsi Riau selama Tahun 2013-2018 berkategori tidak seimbang. Artinya keserasian belanja modal Pemerintah Provinsi Riau tidak optimal. Hal ini karena jumlah pendapatan daerah Provinsi Riau yang digunakan untuk belanja modal tidak sesuai dengan proporsi biaya modal yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan sumber daya manusia di Pemerintahan Provinsi Riau dalam kondisi yang baik dapat dilihat dari nilai skor rata-rata sebesar 3,44 yang berkategori baik.
 3. Pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintahan Provinsi Riau sudah berjalan baik dapat dilihat dari nilai skor rata-rata sebesar 4,04 yang berkategori baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhiantoko, H. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arief, Firda Rahmadhany, Yessi Muthia Basri dan Novita Indrawati, 2017, *Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Riau Berdasarkan Value For Money Audit*, Jurnal Ekonomi Volume 25, Nomor 2 Juni 2017
- Azheri, B. dan I. Wahyudi. 2012. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Setara Press, Malang
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, 2012-2018, *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru*
- Boediono. 2011. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Kompas, Jakarta
- Boulter, Nick, Murray Dalziel, Jackie, 2011, *Manusia Dan Kompetensi: Panduan Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Halim. A., 2011. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* Salemba Empat. Jakarta
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2011. *Kompetensi Plus*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Liando, Harry Saputra, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim, 2014, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money*, Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, ISSN 2303-1174
- Mahsun.M. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Nasrun, Muhammad, 2018, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*, Journal STIEM 8 (8) 1, 2018
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung:
- Suwendra, I W., Saputra, S. C. dan F. Yudiatmaja. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014*, Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol. 4, 2016.
- Villanova, E. R. de, 2015, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Periode 2009-2012*, Skripsi, Universitas Satya Wacana, Yogyakarta
- Widodo. 2011. *Analisa Rasio Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. UPP YKPN, Yogyakarta
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017, tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- <http://www.kemenpan.go.id/>.
<http://www.djpk.depkeu.go.id/>.
www.tribunnews.co.id
www.gatra.co.id